

Adery Ardhan Saputro, SH., LL.M

Email: aderyardhan@ijrs.or.id

LinkedIn: [Adery Ardhan Saputro](#)



Profil Singkat

Adery Ardhan Saputro merupakan lulusan program sarjana Hukum, Universitas Indonesia. Ia kemudian melanjutkan jenjang magisternya pada program *Transnational Legal Studies* di Vrije Universiteit Amsterdam. Adery pernah berkarir di IJRS sebagai Deputy Direktur bidang Program yang mengomandoi para Program Manager dan Program Officer dalam melakukan kerja-kerja lembaga.

Selain itu, Adery juga aktif menjadi pengajar di STIH Adhyaksa. Dalam pembuatan kebijakan dan pedoman, Adery telah membantu menyusun berbagai peraturan yang berkaitan dengan penanganan perkara, seperti yang terbaru: Pedoman Kejaksaan No. 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Keterlibatannya dalam penyusunan Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahkan mengantarkannya untuk mendapat apresiasi dari kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia.

Adery juga terlibat dalam berbagai Pokja di Kejaksaan RI, Mahkamah Agung RI maupun di Kemenkopolhukam, diantaranya: Pokja Akses Keadilan di Kejaksaan RI, Pokja Perempuan dan anak di Mahkamah Agung RI, Pokja tim Koordinasi Keadilan Restoratif di Kemenkopolhukam serta tim Pokja Penyusunan Pedoman Mengadili dan Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika di Mahkamah Agung RI. Semua ini tidak terlepas dari ketertarikannya di isu Peradilan Pidana, Kejaksaan, Reformasi Birokrasi dan Kelompok Rentan (*Vulnerable group*)

Jabatan saat ini

Plt. Direktur Eksekutif

Pendidikan

1. S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia (lulus 2015)
2. S2 Transnational Legal Studies LLM di Vrije Universiteit Amsterdam (lulus 2019)

Pengalaman Kerja

1. Pengajar di STIH Adhyaksa (2022-sekarang)
2. Anggota Pokja Akses Keadilan- Kejaksaan RI (2023-sekarang)
3. Anggota Pokja Perempuan dan Anak -Mahkamah Agung RI (2023-sekarang)
4. Anggota Pokja Tim koordinasi Keadilan Restoratif (2022-sekarang)
5. *Adjunct researcher* MaPPI FHUI (2013- sekarang)
6. Anggota Gugus Tugas UU TPKS (2021-2022)

Program IJRS yang Pernah Dijalankan

1. Program - Assessment of the Consistency of Court Decision in Cases Involving Women (Particularly those who are poor and people with disabilities) – AIPJ
2. Program- Supreme Court Regulation on Sentencing Guideline in Corruption Cases- USAID
3. Socializing and Monitoring Attorney General Office (AGO) – Collaboration with Indonesia Development Ministry - AIPJ

Hasil publikasi

Buku

1. Saputro, Adery Ardhan & dkk. (2016) Catatan Terhadap Beberapa Ketentuan dalam Rancangan KUHP.ICJR
2. Saputro, Adery Ardhan. (2015). Membahas Aturan Peralihan dalam RKUHP. Jakarta: ICJR
3. Saputro, Adery Ardhan, Choky Ramadhan & Fransiscus Manurung. (2016) Difabel Dalam peradilan Pidana. UI Press
4. Saputro, Adery Ardhan & dkk. (2016). Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam peradilan Pidana. UI Press
5. Saputro, Adery Ardhan. Anugerah Rizki Akbari & Bela Annisa. (2016). Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan. UI Press
6. Saputro, Adery Ardhan, Anugerah Rizki Akbari & Andreas Nathaniel Marbun. (2017) Memaknai dan Mengukur Disparitas Studi Terhadap Praktik Pemidanaan Pada Praktik Tindak Pidana Korupsi. UI Press
7. Saputro, Adery Ardhan & dkk. (2022) Audit KUHP (Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia). ICJR..
8. Saputro, Adery Ardhan & dkk (2022) Penelitian Disparitas Pemidanaan dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. IJRS.
9. Saputro, Adery Ardhan & dkk (2022). Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Bappenas RI.

10. Saputro, Adery Ardhan, Matheus Siagian & Andreas Nathaniel Marbun (2022) Buku Saku Saku PERMA 1 Tahun 2022 – Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penerbit MaPPI FHUI.

Artikel Jurnal

1. Saputro, Adery Ardhan.(2016) Konsepsi Rechterlijk Pardon atau Pemafaan Hakim Dalam Rancangan KUHP. Mimbar Hukum UGM Journal, Vol. 28, No.1, 2016.
2. Saputro, Adery Ardhan (2015) Konsep dan Penerapan Plea Bargain di beberapa Negara. Teropong Journal, vol 3, Jul 2015.

Opini

1. Saputro, Adery Ardhan (2014). Kesalahan Mahkamah Konstitusi dalam Penerapan Pasal 335 KUHP, Fiat Justitia bulletin Vol.2 , April 2014.
2. Saputro, Adery Ardhan (2016). Parliament Brief: Tindak Pidana Perkosaan dalam Rancangan KUHP. ICJR
3. Saputro, Adery Ardhan (2015) Anotasi hukum kasus pembunuhan berencana Holly Angela. MaPPI FHUI

Tulisan di Media

1. Saputro, Adery Ardhan, (2015). Peran Kejaksaan RI sebagai dominus litis dalam kekisruhan KPK VS Polri. Selasar. <http://jurnal.selasar.com/politik/kejaksaan-agung-dalam-kisruh-kpk-polri>
2. Saputro, Adery Ardhan, (2023). Revisiting Indonesia's new criminal code: a missed opportunity to end legal uncertainty in drug policy. IDPC. [Revisiting Indonesia's new Criminal Code: A missed opportunity to end legal uncertainty in drug policy - International Drug Policy Consortium \(IDPC\)](#)

Pencapaian

1. Terlibat dalam penyusunan Perma No.5 Tahun 2014 tentang Pidana Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi
2. Terlibat dalam penyusunan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum
3. Terlibat dalam penyusunan Perma No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Terlibat dalam penyusunan Perja No. 15 tahun 2021 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan restoratif
5. Terlibat dalam penyusunan Pedoman Kejaksaan RI No.11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika
6. Terlibat dalam penyusunan Pedoman Kejaksaan RI No. 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis
7. Terlibat dalam penyusunan Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

8. Terlibat dalam penyusunan Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.
9. Terlibat dalam penyusunan Pedoman Kejaksaan No. 8 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
10. Terlibat dalam pemberian masukan untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
11. Terlibat dalam penyusunan Pedoman Kejaksaan No. 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan